



**PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA  
CEPIRING KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh:

Vikka Yunitasari

NIM 3301414110

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2019

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin


Tanggal : 4 Februari 2019

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Dr. Agustinus Sugeng Priyanto M.Si.

NIP.196304231989011002

  
Moh. Aris Munandar S.Sos, MM

NIP. 197207242000031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

  
UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Drs. Tijan M.Si.  
NIP. 196211201987021001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Februari 2019

Penguji I



Martien Herna S., S.Sos.M.Si

NIP. 197303312005012001

Penguji II



Dr. Agustinus Sugeng Priyanto M.Si.

NIP. 196304231989011002

Penguji III



Moh. Aris Munandar S.Sos, MM M.H.

NIP. 197207242000031001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



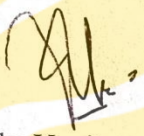
Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.

NIP 19630802 198803 1 001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 13 Februari 2019



Vikka Yunitasari

NIM. 3301414110



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- ✚ *Jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini*
- ✚ *Kita tak akan mampu mengubah apapun jika kita tak mengubah cara piker kita*
- ✚ *Barang Siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.” (HR. Muslim)*

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran serta kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini
2. Bapak dan Ibuku tercinta sebagai ungkapan bakti dan rasa hormat atas jerih payah, didikan serta do'a yang tiada henti
3. Keluarga besarku yang selalu mendo'akan
4. Rekan PPKn angkatan 2014, dan sahabat seperjuangan
5. Almamater Tercinta Universitas Negeri Semarang.

## SARI

**Yunitasari, Vikka. 2019. "Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal".**Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Agustinus Sugeng Priyanto M.Si. Pembimbing 2 Moh. Aris Munandar S.Sos, MM.

### **Kata Kunci: Peran, PKK, Pemberdayaan Perempuan**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang tidak luput dari permasalahan kependudukan, dimana saat ini jumlah penduduk Indonesia menempati urutan terbesar ke empat didunia. Hal ini berkaitan erat dengan berbagai program pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Pembangunan tersebut meliputi berbagai aspek, salah satunya dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. yaitu dengan mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan kelompok-kelompok seperti program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Ketua PKK, Sekretaris PKK, Kepala Desa dan Masyarakat Desa Cepiring. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, menunjukkan bahwa dengan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan kelompok-kelompok seperti program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui teori pemberdayaan suharto yaitu 5P yang memberikan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan untuk mencapai kesejahteraan yaitu dengan keterlibatannya perempuan di PKK. Hasil kesejahteraan keluarga itu nantinya dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas hidup keluarga. Selain itu, permasalahan menyangkut adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Saran, sebagai organisasi perempuan yang ada di Desa Cepiring PKK harus tetap berupaya meningkatkan keterampilan dan mendukung program-program Pemerintah Desa Cepiring, serta perlu adanya peningkatan dan pengembangan program-program yang lebih kreatif dan efektif sehingga mampu menarik masyarakat untuk tergabung.



## PRAKATA

Puji syukur saya penjatkan kahadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan. Sholawat dan salam semoga tetap terkunjuk pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat.

Skripsi ini ditulis sebagai kegiatan penelitian yang telah dilakukan di wilayah Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Penelitian ini merupakan proyek untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.

Bagi saya selaku mahasiswa sangatlah bangga mendapat kesempatan untuk belajar di Universitas Negeri Semarang. Saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pendidikan pada program sarjana ini. Kesuksesan ini tidak mungkin saya raih tanpa bantuan dari orang-orang terkasih dan teman-teman sejawat saya. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohkman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu di perguruan tinggi.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah mengelola akademik, kemahasiswaan dan sarana prasarana perkuliahan.
3. Drs. Tijan, M.Si, selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.

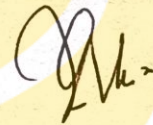
4. Dr. Agustinus Sugeng Priyanto M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan, memberi saran, dan masukan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
5. Moh. Aris Munandar S.Sos, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan, memberi saran, dan masukan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa, perhatian dan selalu mendukung saya baik moril maupun materiil.
8. Sahabat-sahabatku tercinta Febby, Sri Hapsari Lestasi, Exsistensa Pratiwi, Syarifah, Ratna, Maya dan Aditya yang telah memberikan dukungan, semangat dan memberikan perhatian selama mengerjakan skripsi.
9. Keluarga besar mahasiswa Jurusan Politik dan Kewarganegaraan angkatan 2014 yang menjadi teman selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
10. Teman-teman PPL SMK N 4 Kendal dan teman-teman KKN Desa Cangkiran yang telah memberikan motivasi dan semangat selama saya mengerjakan skripsi.
11. Teman-teman SD, SMP, dan SMA yang memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Pihak Kelurahan dan PKK Desa Cepiring yang telah memfasilitasi saya dalam melakukan penelitian skripsi ini.



13. Serta kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dari bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat member manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan.

Semarang, 13 Februari 2019



Penyusun

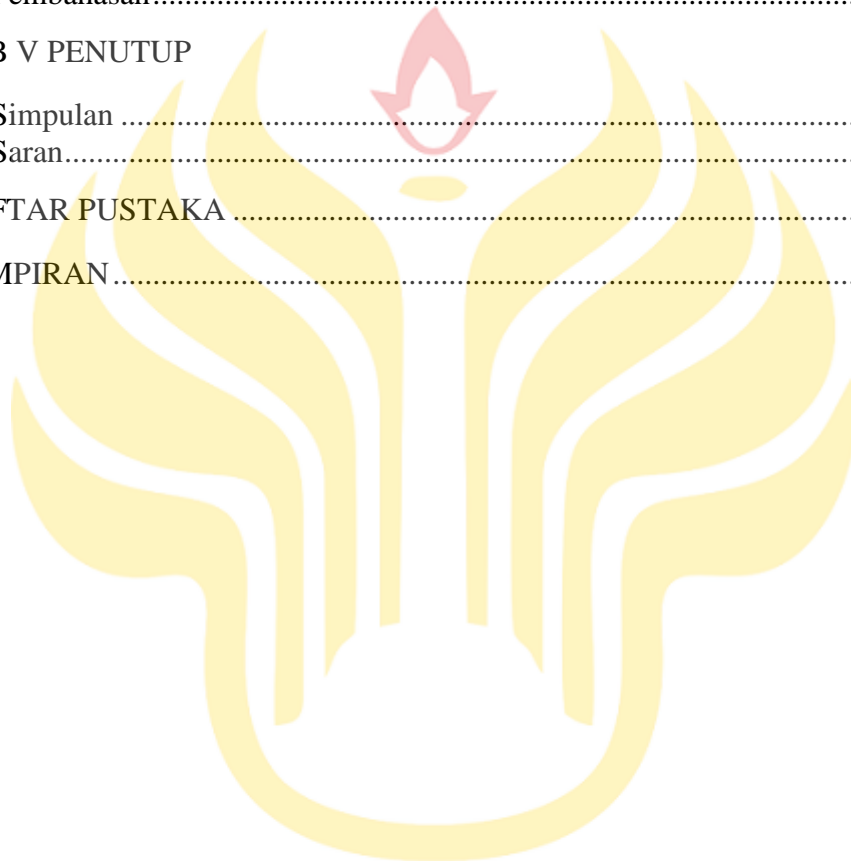


**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI.....	vi
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Batasan Istilah .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Peran .....	9
2.1.1 Pengertian Peran .....	9
2.1.2 Konsep Peran .....	10
2.2 Konsep Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) .....	11
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).....	11
2.2.2 Faktor/Komponen PKK .....	14
2.2.3 Peran PKK dalam Masyarakat .....	20
2.3 Konsep Teori Pemberdayaan .....	21
2.3.1 Pengertian Teori Pemberdayaan .....	21
2.3.2 Tujuan Teori Pemberdayaan .....	23
2.4 Kajian Pemberdayaan Perempuan.....	27
2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan .....	27
2.4.2 Kedudukan Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat .....	29
2.4.3 Pembagian Peran Laki-Laki Dan Perempuan .....	30
2.4.4 Perempuan Dan Gerakan Sosial.....	32
2.5 Kajian Penelitian yang Relevan .....	35
2.6 Kerangka Berpikir Teoritis .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Latar Penelitian .....	42
3.2 Fokus Penelitian .....	43

3.3 Sumber Data.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Validitas Alat Pengumpulan Data.....	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum .....	51
4.2 Hasil Penelitian .....	58
4.3 Pembahasan.....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan .....	89
5.2 Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Suasana Rapat Kepengurusan PKK Desa Cepiring .....	68
Gambar 4.2 Suasana kegiatan Posyandu PKK Desa Cepiring.....	69
Gambar 4.3 Kegiatan PKK DI RT 5 RW 3 Desa Cepiring.....	71



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.6 Kerangka Berfikir Penelitian .....	44
Bagan 4.1.5 Struktur Organisasi PKK Desa Cepiring.....	54



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kelurahan Cepiring Tahun 2018 .....	52
Tabel 4.5 Daftar Kepengurusan PKK Desa Cepiring .....	55
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel 4.7 Umlah Penduduk Wanita Berdasarkan Tingkat Pekerjaan .....	57
Tabel 4.4 jumlah Penduduk Wanita Berdasarkan tingkat Usia.....	57

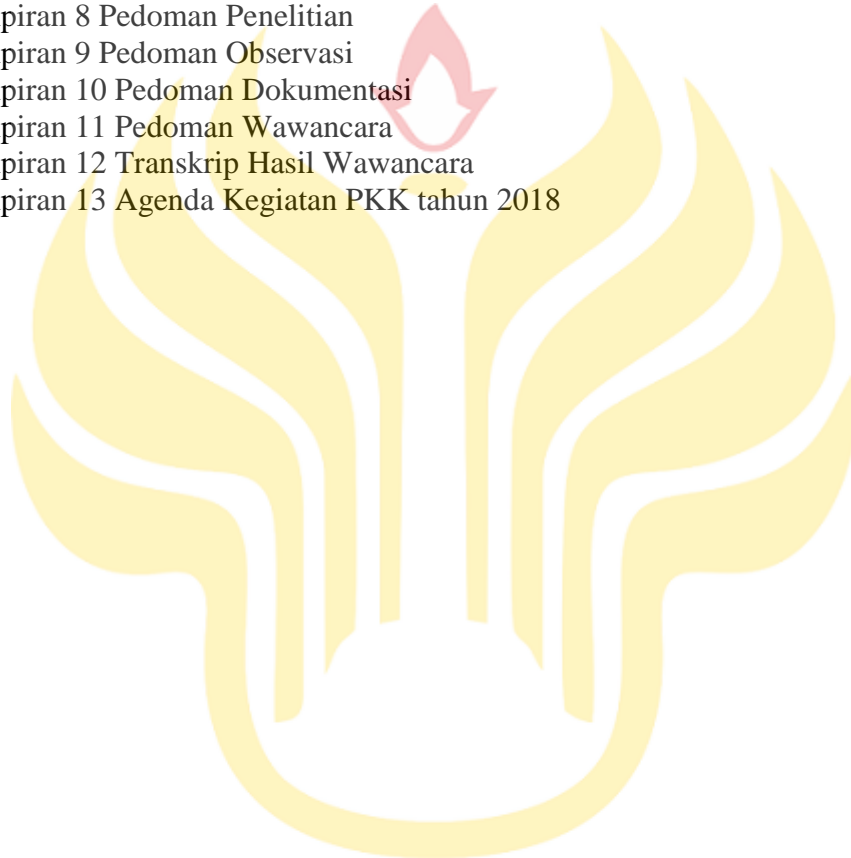


**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial
- Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 SK PKK Desa Cepiring tahun 2018
- Lampiran 5 Rancangan Instrumen Wawancara
- Lampiran 6 Rancangan Instrumen Observasi
- Lampiran 7 Rancangan Instrumen Dokumentasi
- Lampiran 8 Pedoman Penelitian
- Lampiran 9 Pedoman Observasi
- Lampiran 10 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 11 Pedoman Wawancara
- Lampiran 12 Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 13 Agenda Kegiatan PKK tahun 2018



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang tidak luput dari permasalahan kependudukan, dimana saat ini jumlah penduduk Indonesia menempati urutan terbesar ke empat didunia. Hal ini berkaitan erat dengan berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan, dimana kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting terhadap keberhasilan program itu sendiri. Pada hakekatnya pembangunan dapat berjalan dengan lancar apabila sumber daya manusia berpartisipasi secara optimal.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Pembangunan yang dilakukan di daerah pedesaan tidak kalah berkembang dengan pembangunan yang dilakukan di daerah perkotaan. Pembangunan tersebut meliputi berbagai aspek, salah satunya dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu dengan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan kelompok-kelompok seperti program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mampu menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan kegiatan pertubuhan Desa. Hal ini maka kaum perempuan juga punya bagian untuk terlibat dalam sebuah organisasi tertentu.

Mereka juga dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa dengan menggerakkan partisipasi perempuan. Berkaitan dengan itu dahulu perempuan dianggap lebih bertanggung jawab terhadap keluarga dan segala aktivitas yang ada dalam rumah tangga, sementara laki-laki dianggap paling bertanggung jawab dalam bidang kegiatan publik (dunia kerja) seperti bidang ekonomi, politik atau institusi-institusi lain penunjang masyarakat modern (Sugiarti dalam Dhevyanti, 2015:3).

Pemahaman mengenai perempuan dalam masyarakat menyebabkan perempuan Indonesia tertinggal di dalam kehidupan publik. Hal ini menjadikan kesenjangan gender yang senantiasa muncul dalam indikator sektor sosial dimana masyarakat Indonesia, khususnya perempuan masih partisipasi perempuan tidak bisa meningkat.

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan yang tumbuh dari perempuan sebagai penggerak, membina dan membentuk keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, oleh karena itu dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera harus dimulai dari upaya mensejahterakan setiap keluarga. Peranan perempuan dalam pembangunan telah dengan jelas mengamanatkan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mewujudkan keluarga sejahtera dan membina generasi muda.

Sutedjo dalam Gufran (2015:3) menjelaskan bahwa sasaran gerakan PKK adalah Keluarga di pedesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuannya dan kepribadiannya dalam bidang: mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba tuhan, anggota masyarakat dan warga Negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendali dan penggerak. Pembinaan PKK kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur Dinas atau Instansi Pemerintah terkait. Tim penggerak PKK memiliki IV (empat) Kelompok Kerja atau Pokja yaitu Pokja I tugas-tugas berkaitan dengan penghayatan Pancasila dan gotong royong; Pokja II, tugas-tugasnya berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan; Pokja III, tugas-tugasnya berkaitan dengan program sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga; Pokja IV, tugas-tugasnya berkaitan dengan program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

Program pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK. Gerakan PKK bertujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Kegiatan PKK biasanya diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa melalui program-program yang dijalankan. Sehingga membawa kaum perempuan sebagai agen yang sangat penting bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Adapun 10 program yang dimiliki oleh PKK, yaitu penghayatan dan pengalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkeoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

Keterkaitan perempuan dengan PKK ialah mengenai bagaimana perempuan itu dapat aktif untuk mencapai kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan di PKK sehingga eksistensi perempuan diakui oleh semua pihak. Hasil pemberdayaan tersebut nantinya dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas hidup keluarga dan adanya peningkatan ekonomi dari keluarga itu sendiri. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan didalam PKK maka diperlukan akselerasi PKK melalui Reformasi PKK sehingga dapat mengoptimalkan kesejahteraan keluarga di Desa Cepiring.

Berdasarkan dengan permasalahan diatas mengenai pentingnya peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk mencoba melakukan penelitian bahwa PKK sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan desa mampu menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis merencanakan Skripsi dengan judul **“Peran Pemberdayaan**

## **Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal”.**

### **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Untuk mempermudah penelitian maka akan dibahas oleh peneliti, adapun masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana peran PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal ?

1.2.2 Bagaimana faktor-faktor PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di identifikasi tujuan antara lain adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui peran PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor PKK dalam pemberdayakan perempuan di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

### **1.4 Manfaat**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di identifikasi manfaat antara lain adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang sebagai sumbangan



untuk pengembangan pengetahuan tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### 1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenisnya dan bahan perbandingan bagi pemerdayaan perempuan khusus melalui PKK.

##### 1.4.2.2 Bagi Pemerintah

Bagi PKK dan Pemerintahan di Desa Cepiring, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengarahkan sumberdaya perempuan yang dimiliki di Desa Cepiring agar dapat lebih mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menunjang pembangunan masyarakat

### 1.5 Batasan Istilah

#### 1.5.1 Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peran lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan suatu proses (Soekanto,1999:269).

#### 1.5.2 Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan pembangun masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai

motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun mengerahkan dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 21).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 pasal 1 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan wadah yang menggali dan mengerakkan partisipasi masyarakat khususnya dalam lingkungan keluarga, ini berarti wadah yang menampung serta melaksanakan aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam usaha menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) sebagai mekanisme gerakan yang telah berkembang di desa-desa dan di seluruh pelosok tanah air, telah menunjukkan keberhasilannya dengan perempuan sebagai peran utamanya. (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 21).

### 1.5.3 Teori Pemberdayaan

#### 1.5.3.1 Kajian Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004:77) menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “*daya*” yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

#### 1.5.3.2 Kajian Pemberdayaan Perempuan

Menurut Aritonang (2000:142-143) pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: pengambilan keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan perempuan dengan bekal informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan informasi mengenai pentingnya keberadaan mereka di dalam masyarakat, sehingga perempuan memiliki keterampilan, motivasi dan rasa percaya diri untuk menyatakan jati dirinya, mengambil keputusan, dan menggerakkan perempuan lain untuk mengubah dan memperbaiki kehidupannya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Peran

##### 2.1.1 Pengertian Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peran lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan suatu proses (Soekanto 1989: 234). Pentingnya peran adalah karena ia mengatur seseorang atau kelompok. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Atas dasar tersebut Soekanto menyimpulkan bahwa suatu peran mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut :

2.1.1.1 Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2.1.1.2 Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

2.1.1.3 Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Abdulsyani (2007: 94) peran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Sedangkan, Ahmadi (1982: 256) menyebutkan bahwa peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Seseorang dapat memainkan fungsinya dengan menduduki jabatan tertentu. Seseorang dikatakan menjalankan peranannya manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih peranan sosial.

### **2.1.2 Konsep Peran**

Narwoko (2006 : 159) peran dinilai lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. Dalam pembahasan tentang aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan adanya beberapa pertimbangan sehubungan dengan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

2.1.2.1 Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. Peranan tersebut dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus telah terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.

2.1.2.2 Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya.

2.1.2.3 Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya meliputi status atau keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya atau posisinya dalam suatu kelompok. Jika ditinjau dari sudut organisasi atau kelembagaan maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu kegiatan yang didalamnya mencakup hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang memiliki suatu posisi dalam suatu organisasi atau lembaga.

## **2.2 Konsep Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)**



### **2.2.1 Pengertian Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 pasal 1 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan Keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan wadah yang menggali dan mengerakkan partisipasi masyarakat khususnya dalam lingkungan keluarga, ini berarti wadah yang menampung serta melaksanakan aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam usaha menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) sebagai mekanisme dan gerakan yang telah berkembang di desa-desa di seluruh pelosok tanah air, telah menunjukkan keberhasilannya dengan perempuan sebagai peran utamanya. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangun masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun mengerahkan dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 23).

PKK sebagai gerakan pembinaan masyarakat dimulai dari seminar *Home Economic* di Bogor tahun 1957 dan disusun mata mata pelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga tahun 1961 serta menghasilkan 10 segi kehidupan keluarga yaitu *Family relation* (Hubungan inter dan antara keluarga), *Child Care* (Membimbing dan mengasuh anak), *Food* (makanan), *Clothing* (Makanan), *Housing* (Perumahan), *Health* (Kesehatan), *Family Income* (Keuangan Keluarga), *Home Management* (Tatalaksana Rumah Tangga), *Security* (Keamanan Lahir dan Batin), *Sound Planing* (Perencanaan Sehat). (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 23).

Pada tahun 1967 oleh istri Gubernur Jawa Tengah (Ibu Istriati Moenadi) dikembangkan menjadi 10 segi PKK yang meliputi pengahayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang perumahan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan beroperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat sesuai dengan buku kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung. (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 23).

Surat Kawat Mendagri No. SUS 3/6/12 tanggal 27 Desember 1972, pendidikan dirubah menjadi pembinaan dan dilaksanakan diseluruh Indonesia, selanjutnya tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai hari Kesatuan Gerakan PKK. TAP MPR No. 11/MPR/1978 mengamanatkan kaum perempuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera. TAP MPR No. IV/MPR/1984 PKK sebagai salah satu wahana P2W dalam upaya mensejahterakan keluarga. Adanya pengakuan keberhasilan PKK baik oleh masyarakat, pemerintah maupun lembaga

internasional seperti *Maurices Pate* (UNICEF), *Sasakawa Health Prize award* (WHO), *Nouma Litaricy* (UNESCO), Keberhasilan PIN (depkes). Rakernaslub PKK tanggal 31 Oktober-2 November 2000 di Bandung menghasilkan beberapa kesepakatan, yang terpenting adalah perubahan pembinaan kesejahteraan keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 21).

Kelembagan PKK disebut tim penggerak PKK (TP PKK) adalah mitra kerja pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. TP PKK ini meliputi Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan. Hubungan kerja antara TP PKK pusat dengan TP PKK provinsi, kabupaten/kota kecamatan dan desa/kelurahan adalah bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis serta mendekatkan jangkauan pembinaan keluarga-keluarga dibentuk kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan kelompok Dasawisma. (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 21).

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) upaya untuk mensejahterakan masyarakat khususnya perempuan dengan kemampuan memperbaiki dan meningkatkan kedudukan dalam masyarakat serta dapat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia dan berbudi luhur, sehat, maju dan mandiri, berkesetaraan dan berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan lingkungan.

### **2.2.2 Faktor/Komponen Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

Dengan adanya kegiatan PKK diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan keluarga pada umumnya yang berpedoman pada pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK. Selain memiliki program-program pokok, PKK juga memiliki panca dharma PKK. Isi dari panca dharma ini tentang peranan-peranan perempuan dalam kehidupan (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 25), yaitu sebagai berikut:

2.2.2.1 Wanita sebagai pendamping suami

2.2.2.2 Wanita sebagai pengelola rumah tangga

2.2.2.3 Wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak

2.2.2.4 Wanita sebagai pencari nafkah tambahan

2.2.2.5 Wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat

Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor: 14/KEP/PKK Pst/XII/2015, Tanggal 22 Desember 2015 Tentang Hasil Rakernas VIII Bidang Rencana Kerja 5 Tahun PKK Tahun 2015-2020. Sepuluh program pokok PKK yaitu: penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, papan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat. Kelompok kerja (POKJA) sebagai pelaksana program dan kegiatan PKK secara terpadu dilaksanakan oleh pokja-pokja dengan berpedoman pada 10 program pokok PKK :

a. Pokja I

1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila

Penghayatan dan pengamalan Pancasila dengan menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu

dilaksanakan pemahaman secara terpadu. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) mencakup lima (5) unsur yaitu kecintaan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan atas Pancasila, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. Kesadaran Hukum (KADARKUM) adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan diprioritaskan di PKK untuk pencegahan PKDRT, *trafficking*, perlindungan anak, NARKOBA. Pola asuh anak remaja juga diperuntukkan untuk menumbuhkan dan membangun perilaku, budi pekerti, sopan santun di dalam keluarga sesuai budaya bangsa begitu juga dengan pemahaman dan keterampilan (*life skill and parenting skill*) diupayakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.

## 2) Gotong rotong

Gotong royong dilaksanakan dengan membangun kerja sama yang baik, menumbuhkan kesadaran, kesetiakawanan sosial, bertenggang rasa, kebersamaan menghormati antar umat beragama antar sesama keluarga, warga, kelompok untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan. Memberdayakan lanjut usia agar dapat menjaga kesehatan fisik dan mental, kebugaran, keterampilan agar dapat melaksanakan kegiatan secara produktif dan menjadi teladan bagi keluarga dan lingkungannya serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan bakti, kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TTMD).

## b. Pokja II

### 1) Pendidikan dan keterampilan

Pendidikan dan keterampilan mempunyai prioritas program meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan keluarga yang mempunyai anak balita mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal sebagaimana melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB). Meningkatkan mutu dan jumlah pelatihan PKK dengan mengadakan pelatih/*Training of trainer* (TOT). Meningkatkan pengetahuan TP PKK dalam kegiatan Pos PAUD melalui kegiatan PAUD yang diintegrasikan dengan BKB dan Posyandu dengan perteman mitra PAUD bekerja sama dengan pokja IV dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kader dalam mendidik anak usia dini. Meningkatkan kejar paket A, B dan C dengan penyuluhan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan pengembangan Keaksaraan Fungsional (KF) dan membudidayakan minat baca melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) bekerja sama dengan instansi terkait.

## 2) Pengembangan kehidupan berkoperasi

Prioritas program kehidupan berkoperasi dengan meningkatkan kelompok dan kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) selain menumbuhkan kesadaran serta kemampuan berwirausaha keluarga juga sebagai usaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja. UP2K PKK dengan memanfaatkan koperasi sebagai salah satu upaya perbaikan ekonomi keluarga dan mendorong terbentuknya koperasi yang dikelola oleh PKK.

## c. Pokja III

### 1) Pangan

Prioritas program pangan dengan mewujudkan ketahanan pangan keluarga melalui penganeekaragaman pangan dengan pola pangan 3B (beragam, bergizi, berimbang) sesuai potensi daerah. Mengoptimalkan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK) dengan tanaman pangan dan tanaman produktif/keras, minimal untuk memenuhi keperluan keluarga dan tabungan serta meningkatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TGG) untuk menunjang usaha agrobisnis, hortikultura, tanaman buah, perikanan, peternakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam mencapai taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.

## 2) Sandang

Proritas program sandang yaitu mengupayakan hak paten untuk melindungi hak cipta desain dan mengupayakan keikutsertaan dalam pameran dan lomba baik tingkat lokal, nasional dan internasional. Mengadakan kerja sama dengan para desainer, pengusaha, industri sandang, pariwisata dan membudidayakan perilaku berbusana sesuai dengan moral budaya Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mencintai produksi dalam negeri (aku cinta produk Indonesia).

## 3) Perumahan dan tata laksana rumah tangga

Menumbuh kembangkan kembali Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) melalui pemugaran rumah layak huni terutama keluarga miskin dan pengungsi dengan asas Tri Bina (bina usaha, bina manusia dan bina lingkungan), gotong royong serta mengupayakan bantuan dari instansi/dinas terkait, bank, swasta dan masyarakat.

## d. Pokja IV



### 1) Kesehatan

Kesehatan merupakan proiritas utama keluarga dengan memantapkan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) dalam upaya menurunkan prefalensi anak balita kurang gizi, gizi seimbang untuk ibu hamil, ibu menyusui dengan pemberian suplemen zat gizi, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam (6) bulan, Makanan Pendamping (MP ASI) dan pemberian makanan tambahan bagi balita, lansia di posyandu, menjadikan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai kebiasaan sehari-hari dengan cuci tangan pakai sabun, menggunting kuku dan optimalisasi posyandu.

### 2) Kelestarian Lingkungan Hidup

Lingkungan bersih dan sehat dengan menanamkan kesadaran tentang kebersihan pengelolaan kamar mandi dan jamban keluarga, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Menanamkan kebiasaan samapah organik dan non organik serta bahan berbahaya dan beracun untuk didaur ulang selajutnnya ditempat yang benar. Kelestarian lingkungan hidup dengan pengembangan kualitas lingkungan dan pemukiman, kebersihan dan kesehatan, pada pemukiman yang padat dalam rangka terwujudnya kota bersih dan sehat (*Health cities*) serta pencegahan banjir dengan tidak menebang pohon sembarangan karena pohon sebagai paru-paru kota.

### 3) Perencanaan Sehat

Meningkatkan kegiatan dalam program perencanaan sehat dengan meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya pemahaman dan kesertaan dalam program keluarga berencana dan berorientasi pada masa depan dengan cara menabung serta mengatur keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran

keuangan keluarga. Meningkatkan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin. Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan, yang disebut kelompok khusus (POKSUS) tanpa menambah pokja baru, berbeda dalam lingkungan sekertaris umum/pokja-pokja yang bersangkutan (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 42).

### **2.2.3 Peran PKK dalam Masyarakat**

Ima wati (2015:6) menjelaskan bahwa peranan PKK merupakan tindakan yang dilakukan melalui berbagai macam kegiatan keterampilan yang banyak dilakukan mulai dari hidup sehat, pendidikan keluarga yang dimulai dari terbawah rumah tangga (RT) hingga Desa dan Kelurahan. Peran PKK sangat penting bagi Pemerintahan karena merupakan penegak utama antara Negara dan perempuan. PKK bahkan bertugas untuk sebagai mitra Pemerintah yang berperan dan bertujuan sebagai pembantu pemerintah dalam usaha pembangunan. Bahkan dalam struktur organisasi berada dibawah naungan Departemen Dalam Negeri , dan ketuanya di tingkat Desa adalah istri Kepala Desa.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah (Ima wati, 2015:3). Peranan PKK tersebut sejalan dengan visi dan misi PKK, dan didukung dengan sepuluh program pokok yang dimiliki PKK, dan didukung dengan sepuluh program pokok yang dimiliki PKK, kemudian lebih dikenal sebagai “Sepuluh Program Pokok PKK”. Kesepuluh program pokok tersebut adalah: (1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila; (2) Gotong royong; (3)

Pangan; (4) Sandang; (5) Perumahan dan tata laksana rumah tangga; (6) Pendidikan dan ketrampilan; (7) Kesehatan; (8) Pengembanganm kehidupan koperasi; (9) Kelestarian lingkungan hidup; (10) Perencanaan sehat.

## **2.3 Konsep Pemberdayaan**

### **2.3.1 Pengertian Pemberdayaan**

Sulistiyani (2004:77) menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “*daya*” yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata ‘*power*’ yang berarti kekuasaan atau keberdayaan (Suharto, 2010: 57). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Suharto (2005: 59-60) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya yang mencakup fisik, ekonomi

maupun sosial, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Sedangkan Oos M. Anwas (2014: 48-49), secara konsep, pemberdayaan berkaitan dengan kekuasaan. Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya. Oos M. Anwas (2014: 50), pemberdayaan dalam pelaksanaannya memiliki makna: dorongan atau motivasi, dan bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Berdasarkan hal tersebut adalah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Banyak pengertian pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli, semua pengertian mengarah pada bagaimana meningkatkan taraf kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera. Pengertian lain pemberdayaan Soetomo (2011:95-96) pemberdayaan pada umumnya difokuskan pada level komunitas. Hal itu disebabkan karena komunitas dianggap sebagai basis kehidupan masyarakat, dengan demikian apabila proses pembangunan harus dimulai dari bawah, maka awalnya harus berangkat dari kehidupan yang paling dasar. Dalam proses

pembangunan yang menggunakan paradigma dan prespektif sebelumnya yang bersifat *sentralistis, top down* dan berorientasi keseragaman, masyarakat terbawah pada tingkat komunitas inilah yang paling termarginalisasi, sehingga apabila harus diberikan kepada mereka, oleh sebab itu, dalam level yang lebih operasional, proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya menggunakan pendekatan *community based development*, yang artinya adalah bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan berbasis komunitas.

### **2.3.2 Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan yang ingin dicapai pemberdayaan (Suharto, 2005: 60) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya(Suharto, 2005:60).

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu bangsa bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewirausahaan (Anwar, 2007: 3).

Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Nugroho, 2008: 164) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.

- 1) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
- 2) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
- 3) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut
- 4) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Pada dasarnya strategi pemberdayaan adalah cara dalam melaksanakan proses pemberdayaan, strategi-strategi menurut Suharto memiliki tujuan akhir adanya kemandirian. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu pemungkinan, perlindungan, penyokong, dan pemeliharaan (Suharto, 2005: 63) :

- 1) Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
- 2) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak terlindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan atau pendudukan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Maksudnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja. Kebutuhan disini yaitu kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) dirinya dan keluarga. Nah nantinya saat kebutuhan dasar tersebut terpenuhi maka masyarakat tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat lain.



5) Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis lebih merujuk pada teori pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suharto. Dimana terdapat 5 penerapan dalam pendekatan pemberdayaan yang biasa disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Alasannya bahwa teori penerapan pendekatan pemberdayaan dari Suharto cocok untuk meneliti peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

## **2.4 Kajian Pemberdayaan Perempuan**

### **2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan**

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia; satunya lagi adalah laki-laki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah “perempuan” dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, perempuan hanya dianggap sebagai penyokong yang kehidupannya hanya berkutat pada kegiatan di rumah, mengurus anak, memasak, membersihkan rumah. Perempuan hanya berkutat pada kegiatan dapur. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan. Perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih mengutamakan

perasaan dibandingkan dengan rasional. Pemikiran tersebut yang membuat masyarakat berpikir bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya dalam menguasai sesuatu.(Dhevyanti, 2015:25)

Keterbelakangan kaum perempuan di Indonesia tampaknya sangat terkait dengan fakta bahwa perempuan memang dinilai sebagai kelompok yang terlemah dari keluarga Indonesia. Penyebabnya bermacam-macam. Faktor budaya yang dipahami secara sangat kaku bisa jadi merupakan salah satu faktor penyebab. Dalam budaya patriarki menganggap bahwa tugas perempuan adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak. Perempuan berada dibawah posisi laki-laki. Selain itu, penyebab lainnya adalah kurangnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi penghalang bagi kaum perempuan untuk berkiprah di luar rumah.( Dhevyanti, 2015:25)

#### **2.4.2 Kedudukan Pemberdayaan Perempuan Dalam Masyarakat**

Di Indonesia pembahasan dan penyelesaian tentang perempuan sama pentingnya dengan pembahasan dan penyelesaian di segala bidang. Perempuan hanya dianggap sebagai subjek yang pekerjaannya sebagai konsumen penghabis gaji atau pendapatan yang diperoleh suami. Anggapan seperti tidak dapat dibenarkan, karena disadari perempuan juga berkemampuan untuk mencari nafkah atau gaji untuk mendapatkan alternatif pendapatan dan berprestasi. (Supriyadi,2016:91)

Berdasarkan uraian di atas, pengertian dari peran ganda perempuan dalam pembangunan adalah kegiatan, tugas, ataupun partisipasi perempuan yang

mencakup sektor domestik maupun sektor publik pada masa sekarang yang dikenal dengan masa pembangunan (Supriyadi, 2016:92)

Pemberdayaan perempuan menurut Hikmat dalam Rita Pranawati (2009:6) adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat (dalam hal ini perempuan) yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatan sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakang atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Prof. Haryono (dalam Supriyadi, 2016:92) mengatakan pemberdayaan perempuan seringkali disebut sebagai “peningkatan kualitas hidup perempuan”, yakni suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Hariyana (2012:2) pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi, agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, dan kontrol perempuan dan laki-laki di semua bidang pembangunan. Program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya untuk senantiasa mewujudkan

terciptanya dan terdistribusinya manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara berimbang.

Pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Dengan demikian, terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan yaitu sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan dan sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran, dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi (Zakiyah, 2015:44)

Pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) menginginkan perempuan mempunyai kontrol terhadap beberapa sumber daya materi dan materi yang penting dan pembagiannya kembali kekuasaan didalam maupun diantara masyarakat. Strategi pemberdayaan bukan bermaksud menciptakan perempuan lebih unggul dari laki-laki kendati pentingnya meningkatkan kekuasaan, namun ini mengidentifikasi kekuasaan buakn sebagai dalam rangka dominasi yang satu dengan yang lain. Melainkan lebih condong dalam kapasitas perempuan meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. (Radika Wahyu, 2012:10)

Radika Wahyu (2012:10) bahwa yang diperjuangkan dalam pemberdayaan perempuan adalah pemenuhan hak mereka dalam menentukan pilihannya dalam kehidupan dan mempengaruhi arah perubahan melalui kesanggupan melalui kontrol atas sumber daya meterial dan non material.

Pergeseran dan peran (pembagian kerja) antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan rumah tangga, terjadi ketika seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam masyarakat dan Negara. Di mana peran perempuan tidak hanya untuk dipimpin tetapi juga untuk memimpin. Hal itu harus mendapatkan pengakuan yang positif dan pasti.

### **2.4.3 Pembagian Peran Laki-Laki & Perempuan**

Laki-laki dan perempuan memiliki peran gender yang berbeda. Ada perbedaan yang mereka lakukan dalam komunitasnya sehingga status maupun kekuasaan mereka dalam masyarakat menjadi berbeda. Akan menarik jika ditemukan kedudukan suami istri dalam posisi seimbang.

Dhevyanti (2015:25) tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk menentang ideologi patriarki yaitu dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan, mengubah struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan diskriminasi gender dan ketidakadilan sosial. Pendekatan pemberdayaan memberikan kemungkinan bagi perempuan miskin untuk memperoleh akses kepada dan penguasa terhadap sumber-sumber material maupun informasi maka pemberdayaan harus mempersoalkan semua struktur dan sumber kekuasaan. Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantara dengan cara :

1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu , muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat

bahwa kaum perempuan adalah *konco wingking* (teman dibelakang) bagi suami serta anggapan “*swarga nunut neraka katut*” (ke surga ikut, ke neraka terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kapa suami.

2. Memberikan beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. berbagai keterampilan bisa diajarkan, diantaranya: keterampilan menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan.

Longwe (dalam Hariyana , 2012:5) menyatakan bahwa terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Dengan demikian kesenjangan gender ditingkat kesejahteraan ini diukur melalui perbedaan tingkat kesejahteraan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok, untuk masing-masing kebutuhan dasarnya. Misalnya dalam tingkatan penghasilan, tingkat kematian, atau gizi. Pemberdayaan tidak dapat terjadi dengan sendirinya di tingkat ini, melainkan harus dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap sumber daya yang merupakan dimensi



tingkat kedua. Level ini merupakan tingkatan nihil dari pemberdayaan perempuan (*Zero level of women's empowerment*). Padahal upaya untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan diperlukan keterlibatan perempuan dalam proses *empowerment* dan pada tingkat pemerataan yang lebih tinggi.

## 2. Dimensi Akses

Tingkat produktivitas perempuan yang rendah disebabkan keterbatasan akses mereka terhadap faktor produksi seperti tanah, pekerjaan, dan modal. Akses perempuan terhadap pendidikan, informasi dan terhadap pekerjaan dengan upah tinggi relatif lebih kecil dibandingkan laki-laki. Akses perempuan yang kurang terhadap pelatihan keterampilan menyebabkan mereka kurang dapat melakukan kegiatan ekonomi produktif. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan berarti perubahan dari ketimpangan akses menuju sumber dan manfaat.

## 3. Dimensi Keadaan Kritis atau Penyadaran

Kesenjangan gender di tingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomian perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang di atas, bahwa subordinasi perempuan bukanlah pengaturan alamiah, tetapi diskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku. Keyakinan bahwa kesetaraan gender adalah bagian dari tujuan perubahan merupakan inti dari kesadaran gender dan merupakan elemen ideologis dan proses pemberdayaan yang menjadi landasan konseptual bagi perubahan ke arah kesetaraan.

## 4. Dimensi Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi. Aspek ini sangat penting pada proyek pembangunan. Disini partisipasi berarti keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring serta evaluasi. Partisipasi secara umum dapat dilihat dari adanya peran serta setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik ditingkat keluarga, komunitas, masyarakat, maupun negara. Di tingkat program, ini berarti dilibatkannya perempuan dan laki-laki secara setara dalam indentifikasi masalah, perencanaan, pengelolaan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Meningkatnya peran serta perempuan merupakan hasil dari pemberdayaan sekaligus sumbangan penting bagi pemberdayaan yang besar.

## 5. Dimensi Kuasa/Kontrol

Kesenjangan gender di tingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa terjadi di tingkat rumah tangga, komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi. Kesetaraan dalam kuasa berarti adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, satu tidak mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainnya. Artinya perempuan mempunyai kekuasaan



sebagaimana juga laki-laki, untuk mengubah kondisi posisi, masa depan diri dan komunitasnya.

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk mengetahui keberhasilan sebuah proses, dapat dilihat dari indikator pencapaian keberhasilannya. Adapun indikator pemberdayaan perempuan (Melynda dalam Dhevyanti, 2015:27) adalah sebagai berikut :

1. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
2. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka
3. Meningkatkan jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
4. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan
5. Peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan .

Namun lebih dari itu semua adalah terciptanya pola pikir dan paradigma yang tidak ada perbedaan. Perempuan juga harus dapat berperan aktif dalam beberapa kegiatan yang memang proporsinya. Jikalau ini semua telah terealisasi,

maka perempuan benar-benar telah terberdayakan, melihat penjelasan diatas, dapat terlihat pemberdayaan perempuan terbagi menjadi dua, yaitu kesejajaran gender dan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan.

## **2.5 Kajian Penelitian yang Relevan**

Penelitian tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan telah banyak dilakukan, oleh berbagai kalangan pengamat sosial dan ekonomi. Begitu juga pelaksanaan penelitian ini yang berpijak pada berbagai penelitian yang terdahulu yang relevan:

Penelitian yang pertama yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lilik Aslichati dengan judul “*Organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai sarana pemberdayaan perempuan*” dalam penelitian ini diungkapkan bahwa organisasi PKK dapat menjadi wadah atau sarana pemberdayaan perempuan, terutama bagi anggotanya. Meskipun demikian, organisasi PKK belum dapat menumbuhkan kemitrasejajaran dengan laki-laki karena program-programnya masih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan keluarga, dan anggotanya mayoritas perempuan yang tidak bekerja atau pensiunan. Agar organisasi PKK dapat menjadi media pemberdayaan dan kemitrasejajaran perempuan dengan laki-laki, diperlukan hal-hal sebagai berikut: Bagi anggota PKK, perlu diberikan pelatihan: keterampilan menyuluh bagi kader-kader Posyandu, keterampilan berkomunikasi; pembuatan laporan; dan peningkatan kemampuan mengajar bagi anggota yang menjadi guru PAUD. Dan bagi Pemerintah Daerah, perlu memberikan kesempatan kepada perempuan

anggota PKK untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan mengalokasikan dana untuk membantu pengembangan PKK. Kesemuanya harus dituangkan dalam bentuk Peraturan daerah.

Penelitian yang kedua, yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Angelia E. Manembu Dengan Judul “*Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*” dalam penelitian ini diungkapkan bahwa Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa Maumbi Kecamatan Kalawat mendukung pembangunan, yang dapat dilihat dalam kualitas capaian indikator, yakni: Dalam hal cakupan yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan atau proses pembangunan, semua orang terlibat dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan Kalawat tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam hal kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*), ada kesetaraan dan kemitraan dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenis kelamin dan struktur masing-masing pihak dalam upaya pembangunan desa Maumbi kecamatan Kalawat. Dalam hal transparansi, semua pihak telah dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog dalam proses pembangunan desa. Dalam hal kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*) dalam pembangunan desa, berbagai pihak yang terlibat dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi gender tertentu.

Penelitian yang ketiga, yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desi Arisandi Dengan Judul “*Peran PKK Di Dalam Pemberdayaan Perempuan*”

*Di Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*” dalam penelitian ini diungkapkan bahwa Peran PKK di Dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Muara Bengkal Ilir Kabupaten Kutai Timur. Fokus penelitian yang diangkat mengenai Motivator, Fasilitator, Pembinaan (Pendidikan dan Pelatihan) dimana Ketua PKK dan PKK mampu memberdayakan Perempuan di Desa Muara Bengkal Ilir tersebut, sumber data yang diambil dari Informan yaitu Ketua PKK Muara Bengkal Ilir selaku Pimpinan Ibu-ibu serta anggota PKK Desa Muara Bengkal Ilir tersebut, dan Informan dari anggota PKK yaitu Ketua-ketua Pokja dari Pokja I sampai dengan IV dan Beberapa Ibu-ibu di Desa Muara Bengkal Ilir. Dalam hal ini yang harus dilakukan PKK Desa Muara Bengkal Ilir diantaranya adalah PKK Desa Muara Bengkal Ilir harus mampu memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh Ibu-ibu masyarakat Desa Muara Bengkal Ilir, yaitu didalam memberikan Motivasi bagi anggota dan Ibu-ibu masyarakat Desa Muara Bengkal Ilir diharapkan bagi Ketua PKK agar bisa memberikan dorongan atau rangsangan yang lebih banyak lagi, dan dalam memberikan Fasilitas juga terhadap anggota dan ibu-ibu masyarakat Desa Muara Bengkal Ilir PKK diharuskan bisa lebih memfasilitasi didalam hal sarana dan prasarana, maupun hal materi, dan didalam Hal Pembinaan (Pendidikan dan Pelatihan) PKK harus bisa lebih memberikan Pembinaan serta Pendidikan dan Pelatihan yang memang sangat dibutuhkan, dan PKK Desa Muara Bengkal Ilir untuk saat ini didalam hal pemberian Motivator, Fasilitator, Pembinaan (Pendidikan dan Pelatihan).

Penelitian yang keempat, yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Drs. Gufran, M.Si. Dengan Judul "*Peranan Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pengembangan Industri Kerajinan Rumah Tangga Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima*" dalam penelitian ini diungkapkan bahwa peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pengembangan strategi pemasaran sebagai bentuk manajemen usaha industri kerajinan rumah tangga, baik mempersiapkan kualitas alat yang baik, fokus pada pelayanan terbaik ke konsumen dan bangun relasi dengan mereka, pilih lokasi usaha yang strategis, dimana cukup banyak orang di daerah jualan: dekat kantor, kampus, mall, dan lain-lain, buatlah merek, jika kita sudah ada karyawan, maka beri training untuk jualan dan motivasi agar maksimal ketika jualan, lakukan promosi yang masif, bisa dengan spanduk, brosur, ataupun sosial media: facebook, twitter, youtube, blog, terapkan strategiharga, misalnya strategi potongan harga, catat data konsumen untuk database, maupun lakukan evaluasi penjualan secara berkala, maka hasilnya sudah cukup baik dan sesuai dengan manajemen kewirausahaan dan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Penelitian yang kelima, yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ima Wati Dengan Judul "*Peranan PKK Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Endang Rejo Kecamatanseputih Agung*" dalam penelitian ini diungkapkan bahwa Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran PKK di kelurahan Endang Rejo ini adalah dengan membangun kerjasama antara PKK dengan pemerintah. sebagai mitra kerja pemerintah selama ini dalam pelaksanaannya telah berkoor-dinasi dan bekerjasama dengan Dinas/Instansi

terkait atau antar lembaga yang berkaitan dengan program pendidikan dan keterampilan diantaranya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM), dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam program PNPM.

Penelitian yang keenam, yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Joan F Rantung Dkk, Dengan Judul "*Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk ) Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa( Suatu Studi Di Desa Ongkau I Kabupaten Minahasa Selatan*" dalam penelitian ini diungkapkan bahwa Pemberdayaan kesejahteraan keluarga adalah suatu gerakan yang dibentuk untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat guna untuk mewujudkan pembangunan Desa. Kedudukan atau posisi PKK dalam masyarakat cukup penting, karena PKK berusaha untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan Desa dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Penelitian yang ketujuh, yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Ardliyana Trisnawati Dengan Judul "*Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik*" dalam penelitian ini diungkapkan bahwa strategi pemberdayaan melalui pelaksanaan program PKK bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu anggota PKK sehingga dapat menambah dan mengembangkan kemampuannya dalam mengelola keuangan keluarga dan bisa



memberi kontribusi tambahan terhadap ekonomi keluarganya sehingga tercipta keluarga yang sejahtera. Anggota PKK sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang sehari-harinya hanya mengurus keperluan rumah tangganya sehingga banyak mempunyai waktu luang apabila pekerjaan rumah tangga sudah selesai dilakukan. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh PKK Kelurahan Sukorame terdiri atas: mengasah potensi perempuan melalui pelatihan keterampilan, mengembangkan industri rumah tangga atau wirausaha dan mengembangkan kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga. Strategi pemberdayaan perempuan yang dimiliki PKK Sukorame adalah untuk memberi penguatan kepada para perempuan supaya memiliki rasa kontrol terhadap diri yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan yang berada disekitarnya, juga memiliki kesadaran kritis, ketika individu sudah mempunyai kesadaran kritis pada dirinya maka individu mampu memahami persoalan sosial mulai dari masalah yang ada dimasyarakat masalah, identifikasi serta mampu menentukan unsur-unsur yang mempengaruhinya, lalu individu tersebut merasa membutuhkan kegiatan yang diberikan oleh PKK, untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut, dan mempunyai perilaku partisipatif, perilaku partisipatif dipengaruhi oleh kesadaran kritis, kesadaran kritis yang ada pada diri akan membawa individu tersebut melibatkan diri dalam kegiatan yang diberikan oleh PKK karena individu tersebut merasa membutuhkan penguatan diri untuk keluar dari segala permasalahan yang ada untuk menuju pada kesejahteraan keluarga.

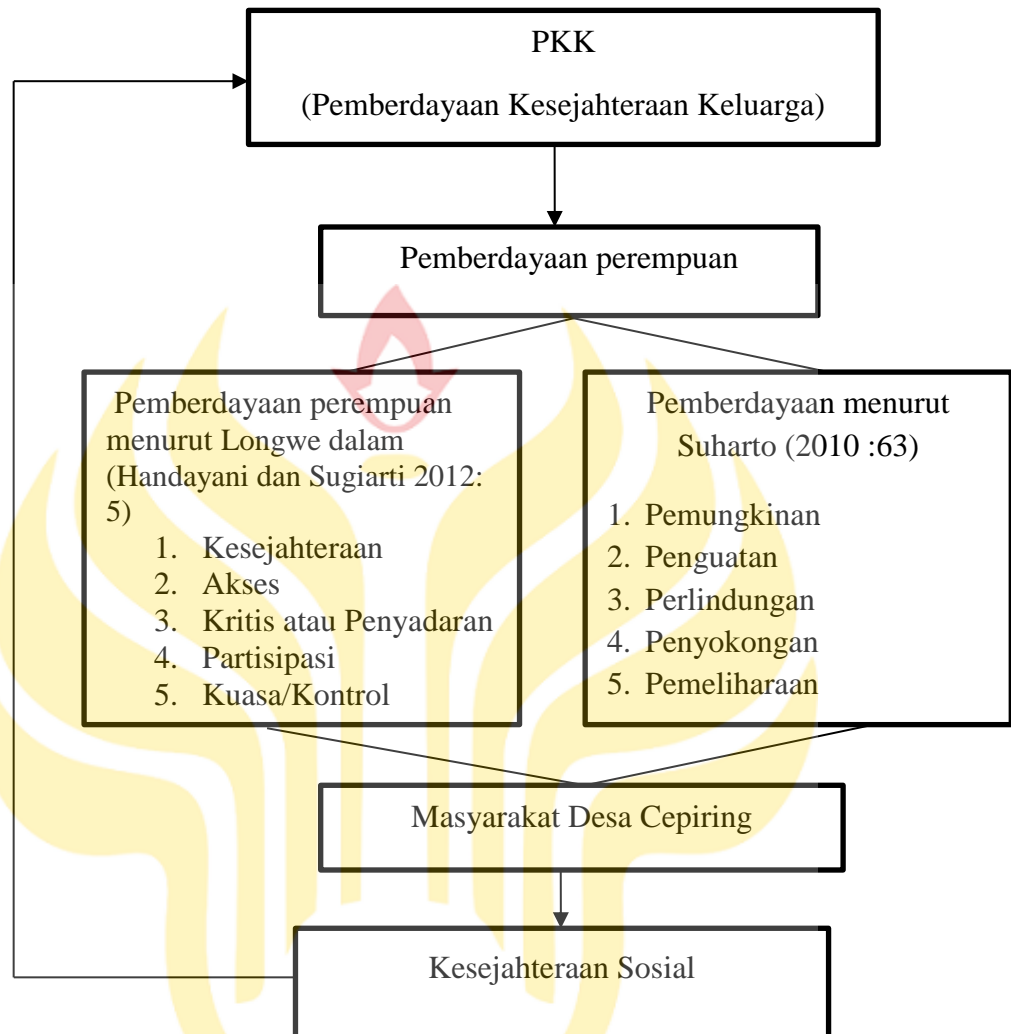


## 2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2016:91).

Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka terlebih dahulu perlu diketahui penjelasan yaitu suatu partisipasi masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan. Salah satunya dengan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan kelompok-kelompok.

Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita di Desa Cepiring Kab. Kendal. Dari pengamatan/observasi yang dilakukan penulis di lokasi penelitian, masih banyak ditemui hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKK tersebut. Diantaranya yaitu kurang aktifnya anggota PKK dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang kurang tahu kegiatan PKK yang ada di desa. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai konsep kerangka berpikir sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada gambar berikut ini :



**Bagan 2.6.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Dari hasil penelitian mengenai peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan Di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program peran PKK dalam meningkatkan pemberdayaan di Desa Cepiring kurang maksimal. Kegiatan yang dilaksanakan masih berupa pengarahan saja dan melanjutkan kegiatan tahun lalu, kemudian banyaknya perempuan yang kurang mau mengikuti PKK dikarekankan kesibukannya masing-masing. Tentu hal ini harus menjadikan pertimbangan bagi PKK Desa Cepiring untuk lebih inovatif lagi mengajak dan memberikan kegiatan PKK yang lebih baik lagi, karena PKK merupakan salah satu gerakan untuk perempuan untuk bisa berpartisipasi langsung dalam masyarakat.
2. Sosialisasi pelaksanaan program PKK di Desa Cepiring kenapa masih bersiat perwakilan yaitu karena kurangnya keaktifan dari pengurus, luasnya daerah, keterbatasan dana, dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan PKK desa Cepiring untuk dilakukan, dan juga banyaknya perempuan yang memiliki kegiatan diluar rumah tangga seperti banyak yang bekerja. Padahal faktor pemberdayaan yang memerlukan partisipasi dari masyarakat.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Kepada PKK Desa Cepiring, sebagai salah satu organisasi perempuan agar lebih inovatif lagi mengajak dan memberikan kegiatan PKK yang lebih baik lagi untuk masyarakat, adanya program kerja yang inovatif dan menarik maka akan mampu menarik masyarakat untuk tergabung di kegiatan PKK.
2. Kepada Pemerintah Desa Cepiring agar dapat memberikan mendorong atau memotivasi perempuan Desa Cepiring yang belum mengikuti program PKK, karena kegiatan PKK juga dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang dapat membantu meningkatkan kemandirian perempuan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Ahmadi, Abu. 1982, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Jakarta: Bina Ilmu
- Ali, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Anwas, Oos, M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Aritonang, Irianton. 2000. *Pemantauan Pertumbuhan Balita*. Jakarta: PT. Kanisius
- Cholisin. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 di Lingkungan Kabupaten Sleman
- Dwi Narwoko, J. (2006). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Eko, Sutoro. 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Fredian Tonny. 2015. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Departemen sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB dan yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Mosse, Julia Cleves. 1992. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- \_\_\_\_\_. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak PKK Pusat. (2010). *Hasil Rapat Kerja Tahunan Nasional VII PKK Tahun 2010*. Jakarta: Tim Penggerak PKK Pusat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Riant Nugroho. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- R. Wrihatnolo Randy, Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Saptari, Ratna. 1997. *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

- Soedarsono dan Gatut Murniatmo. 1986. *Nilai Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: DepdikbudDirjen Kebudayaan Pengkajian Proyek Penelitian Kebudayaan Nusantara Bagian Jawa
- Soekanto Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Revika Aditama
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_.2013.*Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Bandung:Alfabeta.
- Suparjan & Hempri Suyatno. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Zubaedi.2013.*Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group

## **B. Jurnal**

1. Ima Wati, dkk.(Ed). 2015. *PERANAN PKK DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN WANITA KELURAHAN ENDANG REJO KECAMATAN SEPUTIH AGUNG*.
2. Gufran, (Ed). 2015. *Peranan Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pengembangan Industri Kerajinan Rumah tangga Di desa Tanah Putih Kec. SAPE Kab. BIMA*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara STISIP Mbojo BIMA
3. Nur Ardliyana T, Oksiana Jatningsih.(Ed). 2015. *Strategi Pemberdayaan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Sukorame Kec. Gresik Kab. Gresik*.UNESA
4. Supriyadi. 2016. *Pemberdayaan Kader PKK melalui Kegiatan PKK di Desa Banyusidi Kecamatan Magelang*. SKRIPSI. Yogyakarta. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Joan F Rantung,Jantje Mandey,Verry Y Londa. (Ed). 2015. *Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk ) Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa( Suatu Studi Di Desa Ongkau I Kabupaten Minahasa Selatan*
6. Dhevyanti, 2015. *Peran Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Meningkatkan Keterampilan Anggota Kota Semarang*. Fakultas Ilmu Sosial Studi Pendidikan Kewarganegaraan UNNES
7. Hariyana. 2012. *Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk ) Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa( Suatu Studi Di Desa*

- Ongkau I Kabupaten Minahasa Selatan*. SKRIPSI. DEPOK. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Poltik Program Studi Ilmu Administrasi Negara DEPOK
8. Desi Arisandi. 2015. *Peran Pkk Di Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*. Dalam e-jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(4), 2015:1885-1899.
  9. Radika Wahyu Setyoaji. 2012. *Dampak Program Kelompok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Dusun Sosoran Desa Candimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
  10. Angelia E. Manembu. (Ed). 2015. *Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*
  11. Rita Pranawati dan Irfan Abubakar, *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Cet. Ke-1, 2009), h.120.